



GENERASI Z DAN PARTISIPASI POLITIK: REPRESENTASI, NILAI, DAN PRAKTIK DISKURSI POLITIK MELALUI KASUS MAXWELL ALEJANDRO FROST

Rifqi

Universitas Darul Ma'arif Indramayu, Indonesia
riefq816@gmail.com

Kambali

Universitas Wiralodra Indramayu, Indonesia
kambaliibnu@gmail.com

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: Januari 2026

Revised : Februari 2026

Accepted: Maret 2026

Available online : Maret 2026

How to Cite: Rifqi, & Kambali. (2026). Generation Z and Political Participation: Representation, Values, and Practices of Political Discourse through the Case of Maxwell Alejandro Frost . *Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi Dan Pemerintahan*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.61166/ld.v2i1.32>

ABSTRACT

This article aims to analyze the dynamics of Generation Z's political participation in the context of contemporary United States politics by highlighting the election of Maxwell Alejandro Frost as the youngest member of Congress and the first representative of Generation Z. This study employs a qualitative method with a literature review approach, analyzing media articles, survey reports, and statements from relevant figures. The findings indicate that Generation Z's political engagement is characterized by identity awareness, concern for structural issues such as gun reform, climate change, healthcare, and reproductive rights, as well as demands for inclusive and civil political discourse practices. Furthermore, the study finds that openness to intergenerational dialogue, the relationship between faith and politics, and exemplary conduct in civil discourse are important factors in fostering sustainable political participation among Generation Z. This article contributes to enriching the study of youth politics by emphasizing the importance of dialogical and ethical approaches in modern democracy.

KEY WORDS: *Generation Z, political participation, civil discourse, political identity, contemporary democracy*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika partisipasi politik Generasi Z dalam konteks politik Amerika Serikat kontemporer dengan menyoroti terpilihnya Maxwell Alejandro Frost sebagai anggota Kongres termuda dan representasi pertama Generasi Z. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, menganalisis artikel media, laporan survei, serta pernyataan tokoh yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan politik Generasi Z ditandai oleh kesadaran identitas, kepedulian terhadap isu-isu struktural seperti reformasi senjata, perubahan iklim, kesehatan, dan hak reproduksi, serta tuntutan terhadap praktik diskursus politik yang inklusif dan beradab. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa keterbukaan dialog lintas generasi, relasi antara iman dan politik, serta keteladanan dalam diskursus sipil merupakan faktor penting dalam membangun partisipasi politik Generasi Z secara berkelanjutan. Artikel ini berkontribusi dalam memperkaya kajian politik generasi muda dengan menekankan pentingnya pendekatan dialogis dan etis dalam demokrasi modern.

KATA KUNCI: *Generasi Z, partisipasi politik, diskursus sipil, identitas politik, demokrasi kontemporer*

INTRODUCTION

Partisipasi politik generasi muda merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas dan keberlanjutan demokrasi kontemporer. Dalam beberapa dekade terakhir, perhatian akademik terhadap keterlibatan politik kaum muda semakin meningkat, terutama karena menurunnya partisipasi elektoral generasi muda di banyak negara demokrasi, sekaligus munculnya bentuk-bentuk partisipasi politik non-konvensional seperti aktivisme digital, gerakan sosial, dan advokasi berbasis identitas (Dalton, 2017). Dalam konteks ini, Generasi Z (yakni generasi yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012) muncul sebagai aktor politik baru dengan karakteristik, orientasi nilai, dan pola keterlibatan yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya.

Generasi Z tumbuh dalam lanskap sosial-politik yang ditandai oleh percepatan teknologi digital, krisis iklim global, meningkatnya kekerasan senjata, ketimpangan sosial, serta polarisasi politik yang tajam. Kondisi ini membentuk kesadaran politik Generasi Z yang cenderung lebih kritis, personal, dan berorientasi pada isu-isu struktural yang secara langsung memengaruhi kehidupan mereka (Pew Research Center, 2020). Politik bagi Generasi Z tidak lagi dipahami semata-mata sebagai aktivitas elektoral, melainkan sebagai ruang perjuangan nilai, identitas, dan keadilan sosial.

Terpilihnya Maxwell Alejandro Frost dalam pemilu paruh waktu Amerika Serikat tahun 2022 sebagai anggota Kongres dari Distrik ke-10 Florida menandai babak baru dalam representasi politik generasi muda. Pada usia 25 tahun, Frost menjadi anggota Kongres pertama dari Generasi Z, sekaligus simbol meningkatnya pengaruh politik generasi ini dalam sistem demokrasi formal. Kemenangan Frost tidak dapat dilepaskan dari latar belakangnya sebagai aktivis reformasi senjata, penyintas penembakan sekolah, serta figur yang secara terbuka mengusung isu-isu yang menjadi perhatian utama Generasi Z, seperti perubahan iklim, layanan kesehatan, dan hak reproduksi (Astor, 2022; Liu, 2022).

Sebagai politisi muda, Frost tidak hanya merepresentasikan faktor usia, tetapi juga

kompleksitas identitas Generasi Z yang bersifat multietnis, interseksional, dan sadar akan trauma kolektif. Pernyataannya sebagai *“young Black Latino person from the South”* menunjukkan bahwa representasi politik Generasi Z bersifat multidimensional, menggabungkan aspek ras, etnisitas, kelas sosial, dan pengalaman hidup dalam praktik politik. Hal ini sejalan dengan pandangan teoritis mengenai politik identitas kontemporer, yang menekankan bahwa pengalaman sosial individu membentuk preferensi politik dan orientasi kebijakan (Crenshaw, 1991).

Fenomena ini menarik untuk dikaji karena mencerminkan pergeseran pola partisipasi politik dari model konvensional yang berfokus pada institusi dan elite politik, menuju politik berbasis nilai, pengalaman personal, dan keterlibatan komunitas. Generasi Z menunjukkan kecenderungan untuk menilai legitimasi politik bukan hanya dari prosedur demokratis, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan publik mencerminkan keadilan, inklusivitas, dan keberpihakan pada kelompok rentan (Loader, Vromen, & Xenos, 2014).

Selain itu, relasi Generasi Z dengan generasi yang lebih tua dalam diskursus politik juga menjadi persoalan penting. Berbagai studi menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi politik lintas generasi, di mana kaum muda sering merasa tidak didengar, diremehkan, atau dimarjinalkan dalam percakapan politik yang didominasi oleh perspektif generasi sebelumnya (Sloam & Henn, 2019). Kondisi ini berpotensi melemahkan kepercayaan politik dan memperdalam fragmentasi sosial apabila tidak dikelola secara dialogis.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting karena berupaya menjelaskan bagaimana Generasi Z memaknai politik, bagaimana mereka membangun relasi politik dengan generasi yang lebih tua, serta bagaimana diskursus politik yang inklusif, dialogis, dan beradab dapat dikembangkan di tengah polarisasi politik yang semakin tajam. Dengan menjadikan kasus Maxwell Alejandro Frost sebagai titik masuk analisis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan empiris dalam kajian partisipasi politik generasi muda serta memperkaya diskursus tentang masa depan demokrasi kontemporer.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, pola, dan dinamika partisipasi politik Generasi Z, khususnya dalam konteks representasi politik dan diskursus demokrasi kontemporer. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menafsirkan fenomena sosial berdasarkan konteks, narasi, dan konstruksi makna yang berkembang di masyarakat, bukan sekadar mengukur variabel secara kuantitatif (Creswell, 2014).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, meliputi artikel ilmiah, buku akademik, laporan lembaga riset, artikel media daring kredibel, serta dokumen hasil survei yang membahas Generasi Z dan partisipasi politik. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan kutipan wawancara tokoh Generasi Z yang dimuat dalam media massa sebagai data pendukung untuk

memperkaya analisis dan memberikan gambaran empiris mengenai pandangan serta pengalaman politik generasi muda. Pemilihan sumber data dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi, aktualitas, dan kredibilitas sumber (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan dokumen tertulis yang berkaitan dengan tema penelitian. Penelusuran sumber dilakukan secara sistematis melalui basis data jurnal ilmiah, situs resmi lembaga penelitian, serta media arus utama yang memiliki standar jurnalistik yang dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki validitas akademik dan relevansi terhadap fokus kajian (Zed, 2014).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Pada tahap deskriptif, peneliti memaparkan secara sistematis temuan-temuan utama dari literatur yang dianalisis terkait karakteristik politik Generasi Z, representasi politik, serta pola diskursus politik lintas generasi. Selanjutnya, pada tahap analitis, peneliti melakukan interpretasi kritis terhadap data dengan mengaitkan teks-teks yang dianalisis dengan konteks sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakanginya. Proses analisis ini mencakup kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara reflektif dan berkelanjutan (Miles & Huberman, 2014).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai jenis literatur dan sumber data untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan mengurangi potensi bias penafsiran. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh, mendalam, dan argumentatif mengenai partisipasi politik Generasi Z dalam demokrasi kontemporer.

RESULTS AND DISCUSSION

Representasi Politik Generasi Z

Kemenangan Maxwell Alejandro Frost dalam pemilu paruh waktu Amerika Serikat tahun 2022 menunjukkan bahwa Generasi Z tidak lagi berada di posisi marginal dalam arena politik formal, melainkan mulai memasuki ruang-ruang strategis pengambilan kebijakan. Kehadiran Frost di Kongres Amerika Serikat menandai pergeseran signifikan dalam pola representasi politik, di mana generasi muda tidak lagi diposisikan semata sebagai pemilih pasif atau objek mobilisasi elektoral, tetapi sebagai subjek politik yang aktif, sadar, dan memiliki kapasitas representatif. Fenomena ini mengindikasikan adanya transformasi dalam struktur partisipasi politik generasi muda yang semakin menuntut ruang representasi yang autentik dan bermakna.

Dalam perspektif teori partisipasi politik, Dalton (2017) menegaskan bahwa generasi muda cenderung mengembangkan bentuk partisipasi politik baru yang berorientasi pada nilai, pengalaman hidup, dan isu-isu konkret yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Representasi politik bagi Generasi Z tidak lagi dipahami sekadar sebagai keterwakilan prosedural dalam lembaga legislatif, melainkan sebagai kemampuan wakil rakyat untuk menghadirkan suara, pengalaman, dan aspirasi generasi muda ke dalam

proses perumusan kebijakan. Dengan demikian, kehadiran Frost dapat dipahami sebagai simbol sekaligus manifestasi dari tuntutan Generasi Z terhadap model representasi politik yang lebih responsif dan partisipatif.

Pernyataan Frost mengenai identitasnya sebagai “*young Black Latino person from the South*” menegaskan bahwa representasi politik Generasi Z bersifat interseksional. Identitas ras, etnis, kelas sosial, dan pengalaman sosial tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dalam membentuk perspektif politik dan orientasi kebijakan. Pendekatan interseksional ini menunjukkan bahwa pengalaman ketertindasan, marginalisasi, maupun privilese membentuk cara Generasi Z memahami relasi kekuasaan dan keadilan dalam sistem politik. Dalam konteks ini, representasi politik tidak dapat dilepaskan dari pengalaman hidup yang konkret dan berlapis.

Lebih jauh, representasi semacam ini tidak berhenti pada simbol kehadiran kelompok minoritas di ruang politik, tetapi diarahkan pada agenda kebijakan yang merefleksikan realitas sosial generasi muda, seperti keadilan rasial, keamanan publik, pengendalian kekerasan senjata, serta akses terhadap layanan dasar. Hal ini menguatkan argumen Pitkin (1967) bahwa representasi politik yang efektif harus bersifat substantif, yakni mampu menerjemahkan kepentingan dan pengalaman sosial kelompok yang diwakili ke dalam kebijakan publik yang nyata. Dalam kerangka ini, keberadaan politisi muda seperti Frost menjadi penting bukan hanya karena faktor usia, tetapi karena kemampuannya mengartikulasikan kepentingan generasi dan komunitas yang selama ini kurang terwakili.

Selain itu, representasi politik Generasi Z juga mencerminkan pergeseran legitimasi politik dari sekadar otoritas institusional menuju otoritas moral dan pengalaman. Generasi Z cenderung memberikan legitimasi kepada aktor politik yang memiliki kedekatan pengalaman dengan realitas sosial mereka, bukan semata-mata berdasarkan senioritas atau posisi struktural. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi kontemporer semakin menuntut bentuk representasi yang empatik, inklusif, dan berakar pada pengalaman lived experience. Dengan demikian, kasus Maxwell Alejandro Frost dapat dipandang sebagai indikator awal dari transformasi representasi politik di era Generasi Z, yang berpotensi mengubah wajah demokrasi menuju model yang lebih partisipatif dan berkeadilan.

Isu Prioritas dan Kesadaran Politik

Generasi Z menunjukkan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap isu-isu yang berdampak langsung pada kehidupan mereka, terutama kekerasan senjata, perubahan iklim, reformasi layanan kesehatan, dan hak reproduksi. Isu-isu tersebut tidak hanya dipahami sebagai persoalan kebijakan publik yang bersifat teknokratis, melainkan sebagai ancaman eksistensial terhadap masa depan generasi muda. Bagi Generasi Z, politik berkelindan erat dengan pengalaman hidup sehari-hari, sehingga keputusan politik dipersepsikan memiliki konsekuensi langsung terhadap rasa aman, kesehatan, keberlanjutan lingkungan, dan otonomi tubuh.

Kesadaran politik Generasi Z cenderung bersifat personal, reflektif, dan berbasis pengalaman (*experience-based politics*). Hal ini tercermin secara jelas dalam narasi Maxwell Alejandro Frost sebagai penyintas penembakan sekolah yang kemudian terlibat aktif

dalam gerakan reformasi senjata. Pengalaman traumatis tersebut tidak hanya membentuk orientasi politik Frost secara individual, tetapi juga merepresentasikan pengalaman kolektif Generasi Z yang tumbuh di tengah maraknya kekerasan senjata dan ketidakpastian keamanan publik. Dalam konteks ini, politik dipahami sebagai sarana untuk mencegah berulangnya trauma sosial dan melindungi generasi masa depan.

Temuan ini sejalan dengan laporan Pew Research Center (2020) yang menunjukkan bahwa Generasi Z lebih mungkin mengaitkan identitas personal (seperti usia, ras, gender, orientasi nilai, dan pengalaman sosial) dengan preferensi politik mereka. Politik tidak lagi dipandang sebagai arena abstrak yang terpisah dari kehidupan sehari-hari, melainkan sebagai ruang yang secara langsung memengaruhi pembentukan identitas dan struktur relasi sosial. Pernyataan responden survei yang menyatakan bahwa “politik peduli kepada saya karena kebijakan memengaruhi identitas dan komunitas saya” menegaskan bahwa politik dipahami sebagai mekanisme distribusi kekuasaan yang berdampak nyata terhadap posisi sosial individu dan kelompok.

Selain itu, isu perubahan iklim menjadi salah satu agenda politik utama Generasi Z karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan hidup jangka panjang. Generasi ini tumbuh dengan kesadaran bahwa krisis iklim bukan sekadar persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut keadilan antargenerasi dan ketimpangan global. Kesadaran ini mendorong Generasi Z untuk menuntut kebijakan publik yang lebih progresif dan berorientasi pada keberlanjutan, serta mempertanyakan legitimasi aktor politik yang mengabaikan krisis ekologis. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi politik Generasi Z bersifat futuristik, dengan fokus pada dampak kebijakan dalam jangka panjang.

Dalam isu layanan kesehatan dan hak reproduksi, Generasi Z cenderung menekankan pentingnya akses yang adil, inklusif, dan berbasis hak asasi manusia. Politik dipahami sebagai instrumen untuk menjamin kesejahteraan fisik dan psikologis individu, terutama bagi kelompok rentan. Kesadaran politik semacam ini memperlihatkan bahwa Generasi Z tidak hanya memikirkan kepentingan individual, tetapi juga solidaritas sosial dan keadilan struktural dalam sistem kebijakan publik.

Dengan demikian, isu prioritas Generasi Z memperlihatkan pergeseran penting dalam kesadaran politik generasi muda, dari politik berbasis ideologi abstrak menuju politik berbasis pengalaman, identitas, dan keberlanjutan hidup. Politik bagi Generasi Z adalah ruang perjuangan moral dan eksistensial, di mana kebijakan publik dinilai dari dampaknya terhadap kehidupan nyata komunitas mereka. Pergeseran ini menuntut model representasi dan diskursus politik yang lebih empatik, responsif, dan berpihak pada pengalaman konkret generasi muda.

Dialog Lintas Generasi dan Keterbukaan

Hasil survei yang menunjukkan bahwa 45% Generasi Z berharap lebih dilibatkan dalam percakapan politik dengan orang dewasa, serta 77% menginginkan dialog terbuka mengenai perbedaan pandangan, mengindikasikan adanya kebutuhan yang kuat akan komunikasi politik yang dialogis, setara, dan saling menghargai. Temuan ini memperlihatkan bahwa Generasi Z tidak menolak perbedaan pandangan politik, melainkan menuntut ruang diskursif yang memungkinkan pertukaran gagasan secara

rasional dan terbuka. Bagi Generasi Z, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari hasil kebijakan atau mekanisme elektoral, tetapi juga dari proses komunikasi publik yang memberi ruang partisipasi setara bagi semua warga.

Generasi Z menunjukkan preferensi yang kuat terhadap komunikasi politik yang ditandai oleh kejujuran, autentisitas, dan transparansi. Mereka cenderung menolak pola komunikasi yang bersifat satu arah, menggurui, dan menutup ruang perbedaan. Dalam perspektif teori diskursus deliberatif Jürgen Habermas, komunikasi politik yang sehat seharusnya berlangsung dalam situasi wicara ideal (*ideal speech situation*), di mana setiap partisipan memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, mengemukakan argumen, serta mempertanyakan klaim kebenaran tanpa tekanan atau dominasi (Habermas, 1996). Preferensi Generasi Z terhadap dialog yang egaliter mencerminkan tuntutan terhadap praktik demokrasi deliberatif yang berorientasi pada rasionalitas komunikatif, bukan sekadar kekuasaan atau otoritas simbolik.

Kesenjangan komunikasi lintas generasi menjadi persoalan krusial dalam konteks ini. Sloam dan Henn (2019) menunjukkan bahwa kaum muda sering kali merasa tidak memiliki suara dalam diskursus politik yang didominasi oleh generasi lebih tua. Dominasi tersebut menciptakan relasi komunikasi yang asimetris, di mana generasi senior berperan sebagai produsen makna, sementara generasi muda diposisikan sebagai penerima pasif. Dalam kerangka Habermas, kondisi ini dapat dipahami sebagai distorsi komunikasi (*distorted communication*), yakni situasi ketika kekuasaan, status sosial, atau usia menghambat berlangsungnya dialog rasional dan setara.

Lebih jauh, ketertutupan dialog lintas generasi berpotensi melemahkan legitimasi demokrasi. Habermas menegaskan bahwa legitimasi politik dalam masyarakat demokratis tidak semata-mata berasal dari prosedur formal, tetapi dari kualitas proses deliberasi publik yang inklusif dan partisipatif. Ketika Generasi Z tidak diberi ruang untuk menyampaikan argumen dan pengalaman mereka, maka proses deliberasi kehilangan dimensi representatifnya, sehingga berisiko menurunkan kepercayaan politik (*political trust*) dan rasa memiliki (*sense of belonging*) generasi muda terhadap sistem demokrasi.

Sebaliknya, keterbukaan dialog lintas generasi dapat berfungsi sebagai medium pembelajaran demokrasi yang substantif. Dengan memosisikan Generasi Z sebagai mitra dialog, bukan sekadar objek sosialisasi politik, orang dewasa dan aktor politik dapat menciptakan ruang deliberatif yang memungkinkan pertukaran argumen secara kritis dan reflektif. Praktik ini sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya empati, penghormatan terhadap perbedaan, dan kesediaan untuk merevisi pandangan berdasarkan argumen yang lebih baik (*the force of the better argument*).

Dengan demikian, dialog lintas generasi yang terbuka dan deliberatif tidak hanya berkontribusi pada peningkatan partisipasi politik Generasi Z, tetapi juga memperkuat kualitas demokrasi itu sendiri. Dalam konteks politik yang semakin terpolarisasi, pendekatan diskursus deliberatif menawarkan kerangka normatif dan praktis untuk menjembatani perbedaan generasi, membangun kepercayaan, serta menciptakan ruang publik yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Relasi antara Iman dan Politik

Dalam konteks relasi antara iman dan politik, Generasi Z menunjukkan sikap yang relatif reflektif, kritis, dan non-dogmatis. Mereka tidak sepenuhnya menolak keterkaitan antara keyakinan agama dan pilihan politik, namun menentang penyatuan iman dan politik yang bersifat kaku, absolut, dan menutup ruang dialog. Bagi Generasi Z, iman diposisikan sebagai sumber nilai etis yang membimbing orientasi moral, kepekaan sosial, dan komitmen terhadap keadilan, bukan sebagai instruksi politik yang deterministik dan mengikat secara ideologis.

Sikap ini dapat dipahami dalam kerangka teori etika publik Jürgen Habermas, khususnya gagasannya tentang post-secular society. Habermas (2008) menegaskan bahwa dalam masyarakat modern yang plural dan pascasekuler, agama tetap memiliki peran normatif di ruang publik, namun harus dikomunikasikan melalui bahasa rasional yang dapat dipahami dan diterima secara intersubjektif oleh seluruh warga negara. Dalam konteks ini, keyakinan agama tidak dikeluarkan dari ruang publik, tetapi dituntut untuk mengalami proses translation proviso, yakni penerjemahan nilai-nilai religius ke dalam argumen etis yang bersifat universal dan rasional.

Pandangan Generasi Z yang memosisikan iman sebagai sumber nilai, bukan instruksi politik yang kaku, sejalan dengan prinsip tersebut. Generasi ini cenderung menerjemahkan nilai-nilai keagamaan (seperti keadilan, kepedulian terhadap sesama, dan penghormatan terhadap martabat manusia) ke dalam bahasa etika publik yang inklusif. Dengan demikian, iman berfungsi sebagai inspirasi moral dalam diskursus politik, tanpa mendominasi atau menyingkirkan pandangan lain yang berbeda secara keyakinan.

Selain itu, pendekatan Generasi Z terhadap relasi iman dan politik juga dapat dijelaskan melalui perspektif José Casanova (1994) mengenai public religion. Casanova menolak anggapan bahwa modernisasi selalu berujung pada privatisasi agama. Sebaliknya, agama dapat hadir di ruang publik secara konstruktif, asalkan berkontribusi pada penguatan nilai-nilai demokratis, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, agama tidak berperan sebagai kekuatan hegemonik, melainkan sebagai aktor moral yang terlibat dalam dialog publik.

Sikap reflektif Generasi Z terhadap agama dan politik menunjukkan afinitas yang kuat dengan gagasan Casanova tersebut. Generasi ini cenderung kritis terhadap politisasi agama yang bersifat eksklusif dan memecah belah, namun tetap mengakui peran agama sebagai sumber etika publik. Mereka menolak penggunaan agama sebagai alat legitimasi kekuasaan, tetapi menerima agama sebagai basis moral untuk memperjuangkan isu-isu kemanusiaan, seperti keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan, dan perdamaian sosial.

Temuan ini juga sejalan dengan studi Smith dan Denton (2005) yang menunjukkan bahwa generasi muda mengembangkan religiositas yang bersifat individual-reflektif, di mana keyakinan agama dinegosiasikan secara aktif dalam ruang sosial dan politik. Religiusitas semacam ini memungkinkan Generasi Z untuk hidup dalam pluralitas nilai dan pandangan tanpa harus mengorbankan identitas keagamaannya. Dalam konteks demokrasi deliberatif, sikap ini menjadi modal penting untuk membangun ruang publik

yang inklusif, dialogis, dan beretika.

Dengan demikian, relasi antara iman dan politik dalam pandangan Generasi Z dapat dipahami sebagai praktik etika publik yang dinamis. Iman tidak dikeluarkan dari ruang politik, tetapi dihadirkan secara reflektif dan argumentatif, sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, rasionalitas publik, dan penghormatan terhadap pluralitas. Pendekatan ini menunjukkan potensi Generasi Z dalam membangun demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga bermoral dan berkeadaban.

Diskursus Sipil sebagai Teladan

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah kritik Generasi Z terhadap pola komunikasi politik yang ditampilkan oleh sebagian orang dewasa, yang kerap bersifat agresif, dismissif, dan menutup ruang partisipasi bagi suara generasi muda. Pengalaman tersebut membentuk persepsi Generasi Z bahwa kualitas demokrasi tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kebijakan atau kemenangan elektoral, tetapi juga oleh cara perbedaan pandangan dikelola dan diperdebatkan dalam ruang publik. Dengan kata lain, demokrasi dipahami sebagai proses komunikasi yang berkelanjutan, bukan sekadar mekanisme prosedural.

Generasi Z menilai bahwa diskursus politik yang sarat emosi, serangan personal, dan klaim kebenaran sepihak justru melemahkan substansi demokrasi. Pola komunikasi semacam ini menciptakan iklim politik yang eksklusif dan tidak ramah bagi partisipasi, terutama bagi kaum muda yang masih membangun identitas politiknya. Ketika ruang diskusi didominasi oleh suara yang lebih tua dan berkuasa, Generasi Z cenderung menarik diri atau memilih mengekspresikan pandangan politiknya di luar ruang publik formal, seperti melalui aktivisme digital atau gerakan sosial alternatif.

Menurut Generasi Z, diskursus politik yang sehat harus dilandasi oleh kerendahan hati intelektual, empati, serta kesediaan untuk mendengarkan dan memahami perspektif orang lain. Prinsip-prinsip ini selaras dengan gagasan diskursus deliberatif Jürgen Habermas yang menekankan pentingnya rasionalitas komunikatif (*communicative rationality*) dalam demokrasi. Dalam kerangka Habermas (1996), diskursus publik yang ideal adalah diskursus yang memungkinkan pertukaran argumen secara rasional, bebas dari dominasi, serta terbuka terhadap koreksi dan pembelajaran bersama.

Keteladanan dalam diskursus sipil menjadi faktor kunci dalam konteks ini. Generasi Z memandang bahwa orang dewasa, khususnya aktor politik, pendidik, dan pemimpin komunitas, memiliki tanggung jawab moral untuk menampilkan praktik komunikasi politik yang beradab. Keteladanan tersebut tidak hanya tercermin dalam pilihan kata yang santun, tetapi juga dalam sikap menghargai perbedaan, kesediaan mengakui kekeliruan, dan kemampuan mengelola konflik secara konstruktif. Dalam perspektif demokrasi deliberatif, keteladanan semacam ini berfungsi sebagai modal normatif yang memperkuat legitimasi diskursus publik.

Lebih jauh, praktik diskursus sipil yang konsisten berpotensi membangun kepercayaan politik (*political trust*) di kalangan Generasi Z. Ketika generasi muda merasa didengar dan dihargai, mereka cenderung mengembangkan rasa memiliki terhadap sistem demokrasi dan terdorong untuk terlibat secara lebih aktif. Sebaliknya, absennya diskursus

sipil dapat memperdalam sinisme politik dan apatisme, yang pada akhirnya melemahkan partisipasi politik jangka panjang.

Dengan demikian, diskursus sipil tidak dapat dipandang sebagai aspek pelengkap dalam demokrasi, melainkan sebagai fondasi etis dan komunikatif yang menentukan kualitas partisipasi politik. Bagi Generasi Z, keteladanan dalam diskursus sipil merupakan prasyarat utama bagi terciptanya ruang publik yang inklusif, dialogis, dan berkeadaban. Dalam konteks politik yang semakin terpolarisasi, penguatan diskursus sipil menjadi strategi penting untuk menjembatani perbedaan, memperkuat kohesi sosial, dan memastikan keberlanjutan demokrasi di masa depan.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa Generasi Z telah berkembang menjadi aktor politik yang sadar, reflektif, dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan sosial dalam demokrasi kontemporer. Melalui kajian terhadap kasus Maxwell Alejandro Frost sebagai representasi politik Generasi Z, penelitian ini menegaskan bahwa generasi muda tidak lagi berada di pinggiran politik formal, melainkan mulai mengambil peran strategis dalam ruang pengambilan kebijakan. Representasi politik Generasi Z bersifat substantif dan interseksional, dengan menempatkan pengalaman hidup, identitas, serta isu-isu struktural sebagai basis utama perjuangan politik.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa kesadaran politik Generasi Z dibangun melalui pengalaman personal dan kolektif, terutama dalam merespons isu-isu eksistensial seperti kekerasan senjata, perubahan iklim, layanan kesehatan, dan hak reproduksi. Politik dipahami sebagai ruang yang secara langsung memengaruhi rasa aman, kesejahteraan, dan keberlanjutan hidup, sehingga mendorong Generasi Z untuk terlibat secara aktif dan kritis dalam proses demokrasi.

Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya dialog lintas generasi yang terbuka dan deliberatif. Generasi Z menuntut pola komunikasi politik yang egaliter, jujur, dan menghargai perbedaan, sejalan dengan prinsip diskursus deliberatif yang menekankan rasionalitas komunikatif dan kesetaraan partisipasi. Keterbukaan dialog dan keteladanan dalam diskursus sipil terbukti menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan politik, memperkuat kohesi sosial, serta mendorong partisipasi politik generasi muda secara berkelanjutan.

Dalam relasi antara iman dan politik, Generasi Z menunjukkan pendekatan etika publik yang reflektif dan kontekstual. Iman diposisikan sebagai sumber nilai moral yang menginspirasi kepedulian terhadap keadilan dan kemanusiaan, tanpa direduksi menjadi instruksi politik yang dogmatis. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan masyarakat pascasekuler, di mana nilai-nilai religius hadir di ruang publik melalui bahasa etika yang inklusif dan rasional.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan demokrasi di masa depan sangat bergantung pada kemampuan sistem politik untuk mengakomodasi suara, pengalaman, dan nilai-nilai Generasi Z. Penguatan representasi substantif, diskursus sipil yang berkeadaban, serta dialog lintas generasi yang deliberatif menjadi prasyarat utama bagi terciptanya demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.

BIBLIOGRAPHY

- Astor, M. (2022). *25-Year-Old Florida Democrat Secures Generation Z's First House Seat*. New York Times.
- Casanova, J. (1994). *Public Religions in the Modern World*. Chicago: University of Chicago Press.
- Crenshaw, K. (1991). *Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color*. *Stanford Law Review*, 43(6), 1241–1299.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Dalton, R. J. (2017). *The Participation Gap: Social Status and Political Inequality*. Oxford University Press.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge: Polity Press.
- Habermas, J. (2008). *Notes on Post-Secular Society*. *New Perspectives Quarterly*, 25(4), 17–29.
- Hasan, Iqbal. (2008). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Liu, J. (2022). *25-year-old Maxwell Frost will be the first Gen Z member of Congress*. CNBC.
- Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. A. (2014). *The Networked Young Citizen: Social Media, Political Participation and Civic Engagement*. *Information, Communication & Society*, 17(2), 143–150.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Pew Research Center. (2020). *On the Cusp of Adulthood and Facing an Uncertain Future: What We Know About Gen Z So Far*.
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press.
- Sloam, J., & Henn, M. (2019). *Youthquake 2017: The Rise of Young Cosmopolitans in Britain*. Palgrave Macmillan.
- Smith, C., & Denton, M. L. (2005). *Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenagers*. Oxford University Press
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zed, Mestika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.